



RABU, 04 JUNI 2025

SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Izin Mati, Sewa Tak Dibayar Satgasus PAD Datangi 3 Pemilik HPL

BENGKULU – Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bengkulu mendatangi 3 lokasi Hak pengelolaan Lahan (HPL) milik Provinsi Bengkulu, Selasa 3 Juni 2025.

3 lokasi HPL yang didatangi itu yakni Hotel Pasir Putih, Restoran Sopo Godang dan Hotel Nala Seaside.

Sekretaris Inspektorat Provinsi Bengkulu, Ade Iswadi menjelaskan tiga lokasi tersebut memiliki permasalahan terkait dengan perpanjangan masa sewa dan perizinan lokasi lahan.

Dimana sewa kontrak yang seharusnya telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, namun pihak pengelola masih beroperasi dan melakukan kegiatan serta aktivitas di lokasi tersebut.

“Ini bukti konkret yang kemarin baru dilantik, hari ini langsung turun. Memang permasalahannya ini terkait dengan masa kontrak dan perizinan lahan. Kita buat kesepakatan dalam waktu dekat 2 sampai 3 hari kedepan untuk memenuhi dokumen yang kita minta agar permasalahan bisa segera tuntas,” kata Ade.

Lebih lanjut ia menjelaskan, para pengelola atau pemegang HPL diminta membuat surat pernyataan untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu sekitar dua sampai tiga hari kedepan.

Ditambahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, Hadianto, berdasarkan arahan dari Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, untuk

segera melakukan tugas dan fungsi dari Satgas PAD yang baru dikukuhkan.

Kemudian langsung membentuk kelompok unit dan mendatangi beberapa pihak yang selama ini memiliki permasalahan terkait dengan penyewaan dan izin lokasi lahan di beberapa aset yang merupakan kewenangan Provinsi Bengkulu.

“Ini merupakan tekad dan komitmen kita untuk mengoptimalkan PAD dan aset milik daerah Provinsi Bengkulu yang selama ini masih ada permasalahan dan kurang efektif. Sesuai arahan Bapak Gubernur kita hari ini langsung turun melakukan peninjauan di beberapa lokasi. Tadi sebenarnya di rapat itu ada 6 lokasi yang akan dikunjungi tapi karena keterbatasan waktu di hari pertama ini kita kunjungi 3 lokasi dulu,” kata Hadianto.

Sementara itu, Penata Kebijakan Kapolri Madya Tingkat III Polda Bengkulu, AKBP Max Mariners mengatakan pendampingan yang dilakukan oleh pihak TNI Polri dan Kejaksaan yakni apabila terdapat data yang tidak valid dan ditemukan adanya suatu pelanggaran hukum atau tindak pidana, maka dari tim Satgasus sendiri nantinya akan melakukan tindak lanjut terhadap yang bersangkutan.

“Kita lakukan pendampingan itu gunanya untuk apabila dalam proses kita melihat data ditemukan pelanggaran hukum,” terang Max.

Apabila ada indikasi pelanggaran, maka bukti-buktinya akan diserahkan kepada penegak hukum

“Nanti jika ada bukti-bukti akan kita bawa karena dalam SK tersebut disebutkan apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum, maka dari pihak Satgasus akan menyerahkan ke pihak penegak hukum,” tambah AKBP Max. (cw2)